

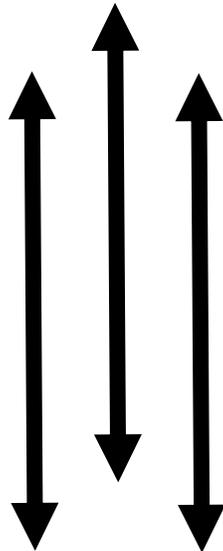


**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 46 Kota Pekalongan Kode Pos 51114 Telepon: (0285) 423993  
Faksimile 423993 e-mail [dkpkotapekalongan@gmail.com](mailto:dkpkotapekalongan@gmail.com) Website [dkpkotapekalongan.go.id](http://dkpkotapekalongan.go.id)

---

**RENCANA KERJA ( RENJA )**  
**TAHUN 2022**





**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Laksda Yos Sudarso Nomor 46 Kota Pekalongan Kode Pos 51114 Telepon: (0285) 423993  
Faksimile 423993 e-mail [dkpkotapekalongan@gmail.com](mailto:dkpkotapekalongan@gmail.com) Website [dkpkotapekalongan.go.id](http://dkpkotapekalongan.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN**  
**NOMOR 523 /           TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (DKP)**  
**KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022**  
**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

- Menimbang :   a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ;
- b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tindaklanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2022.
- Mengingat    :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, ` Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) ;
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN TENTANG RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (DKP) KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022.**

#### Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan Tahun 2022, adalah dokumen perencanaan Tahun 2022 yang dimulai sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
- (2) Renja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan Tahun 2022, merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan Tahun 2022 setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

## Pasal 2

Renja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel

sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan;

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah thn lalu;

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup.

Pasal 3

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud padapasal 1 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KOTA PEKALONGAN

Ir. AGUS JATI WALUYO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620105 198603 1 012

## DAFTAR ISI

<b>Cover</b>	.....
<b>Daftar Isi</b>	.....
<b>BAB I Pendahuluan</b>	.....
1.1 Latar Belakang	.....
1.2 Landasan Hukum	.....
1.3 Maksud Dan Tujuan	.....
1.4 Sistematika Penulisan	.....
<b>BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu</b>	.....
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah` Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	.....
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	.....
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Perangkat Daerah	.....
2.4 Rivew Terhadap Rancangan Awal RKPD	.....
2.5 Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Usulan Masyarakat	.....
<b>BAB III Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah</b>	.....
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	.....
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	.....
3.3 Program Dan Kegiatan	.....
<b>BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah</b>	.....
<b>BAB V Penutup</b>	.....

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah adalah amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa :

1. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan ;
2. Renja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
3. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup:
  - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
  - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
4. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD, dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Dengan hal tersebut maka renja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

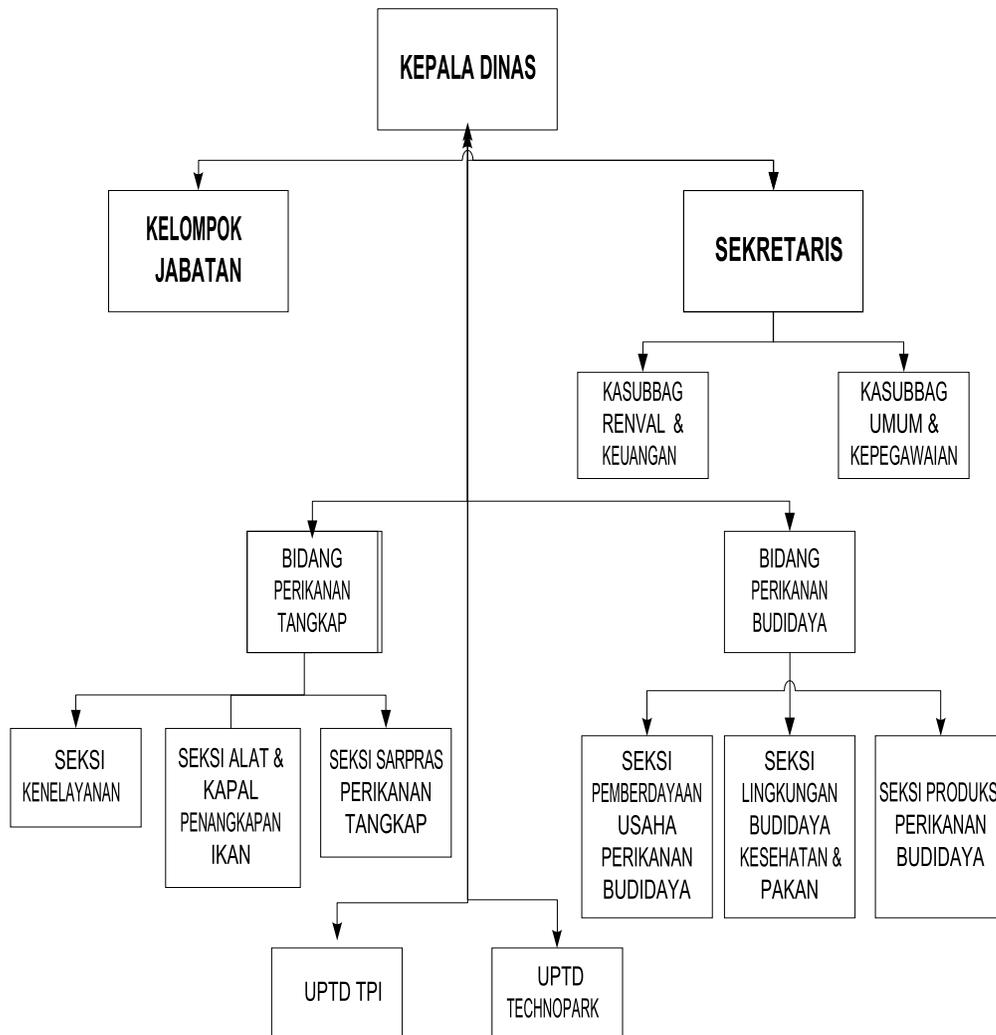
Penyajian rancangan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dilakukan dengan melihat Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Berdasarkan Peraturan Walikota 83 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kelautan dan perikanan dipimpin oleh Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah Kota Pekalongan memiliki 1 (satu) sekretariat, 2 ( Dua ) bidang, yaitu Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya dan 2 ( Dua ) Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD).

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan sasaran program urusan bidang kelautan dan perikanan;
- b. pengkoordinasian penyediaan infrastruktur pendukung di bidang kelautan dan perikanan serta penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- c. pembinaan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan;
- d. penetapan program penyuluhan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- e. penyelenggaraan penataan, pengembangan dan pengawasan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
- f. pembinaan produksi di bidang kelautan dan perikanan dan pengawasan mutu serta peredaran benih/bibit ikan;
- g. pembinaandanpengawasanpelaksanaanpelelanganikan;
- h. pengendalian dan pemberdayaan nelayan kecil;
- i. penetapan pemberian rekomendasi izin usaha perikanan dan penerbitan surat pencatatan usaha penangkapan ikan dan pembinaan pembudidayaan ikan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- j. pengkoordinasian fasilitasi riset dan pemagangan di bidang kelautan dan perikanan;
- k. pengarah dan pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
- l. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan program dan pelaksanaan kegiatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengantugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dapat dilihat pada Gambar berikut :



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan sebagai berikut :

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, ` Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) ;
16. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan ;

### a. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 ini *dimaksudkan* untuk pedoman dan acuan dalam perencanaan program maupun anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan selama 1 (Satu) Tahun dan merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan peraturan kepala daerah tentang RKPD .

Pedoman pada hasil evaluasi hasil renja perangkat daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan *bertujuan* untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal renja perangkat daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

### b. Sistematika Penulisan

Penyajian dokumen renja perangkat daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

#### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

#### BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB. II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Untuk mendukung peningkatan produksi Perikanan, di Kota Pekalongan dilaksanakan 3 (tiga) program yakni Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Agribisnis Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Technopark Perikanan yang terdistribusi dalam 7 indikator Kinerja Program, dengan realisasi sebanyak 3 (Tiga) indikator yang mencapai target dan 4 (Empat) indikator belum mencapai target.

**(1) Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

Program ini diukur dengan 3 (tiga) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Target dan Capaian Indikator  
Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

No	Indikator Program	Target 2020		Capaian 2020
		Angka	satuan	
1	Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	1,95	persen	-0,41
2	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	1,95	Rp. Milyar	-0,41
3	Nelayan yang dibina	8	persen	14,64

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

**(a) Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap**

Nilai produksi perikanan tangkap di TPI Kota Pekalongan menunjukkan angka yang fluktuatif. Hal ini bisa dilihat pada kurun waktu 2017 jumlah nilai produksi ikan tangkap sebesar Rp 164.608.434.000,00 pada tahun 2018 menurun menjadi Rp 156.811.357.000,00. Namun demikian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp 177.561.710.000,00 atau

terjadi **peningkatan** nilai produksi perikanan tangkap sebesar Rp. 20,8 Milyar (13.23%) melebihi target Tahun 2019 sebesar 2%, Pada Tahun 2020 untuk peningkatan nilai produksi perikanan tidak memenuhi target yakni target 1,95 % realisasi hanya -0,41 %. Berikut kami sampaikan tabel nilai produksi perikanan tangkap di TPI Kota Pekalongan dari Tahun 2015 sampai dengan 2020.

**Tabel 2.1 Nilai Produksi Perikanan Tangkap di TPI Kota Pekalongan**

Tahun	Produksi (kg)	Nilai Produksi (Rp)
2015	14.730.900	188.579.000.000
2016	15.641.111	209.626.606.000
2017	10.474.512	164.608.434.000
2018	10.980.029	156.811.357.000
2019	14.991.858	177.561.710.000
2020	13.887.554	176.838.757.000

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

**(b) Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI**

Pada Tahun 2018 realisasi PAD sebesar 4.704.340.710,- dan Tahun 2019 realisasi sebesar Rp. 5.326.851.300,- mengalami peningkatan sebesar 13,23% melebihi target Tahun 2019 sebesar 2%. Pada Tahun 2020 capaian kinerja peningkatan pendapatan daerah bersumber dari TPI dengan target 1,95% realisasi hanya - 0,41% . Tidak tercapainya kinerja peningkatan nilai produksi perikanan tangkap dan Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI hal ini dikarenakan :

- Sering terjadi banjir rob di parkir truk ;
- Tahun 2020 suplai ikan dari truk (dari Juwana) turun 43,9%, adapun dari kapal sebenarnya mengalami kenaikan (13,06%).

Berikut tabel realisasi PAD bersumber dari TPI Tahun 2020.

**Tabel 2.2 Realisasi PAD Bersumber dari TPI**

Tahun	PAD
2015	5.621.298.630
2016	6.288.798.180
2017	4.938.253.020
2018	4.704.340.710
2019	5.326.851.300
2020	5.305.162.730

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

## (2) Program Pengembangan Agribisnis Budidaya Perikanan

Program ini diukur dengan 3 (tiga) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Target dan Capaian Indikator  
Program Pengembangan Agribisnis Budidaya Perikanan**

No	Indikator Program	Target 2020		Capaian 2020
		Angka	satuan	
1	Peningkatan produksi perikanan budidaya	0	persen	-53,97
2	peningkatan konsumsi makan ikan	6	persen	8,10
3	persentase pembudidaya yang dibina	30	persen	29,81

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

### a) *Peningkatan produksi perikanan budidaya*

Produksi perikanan budidaya Tahun 2019 mengalami peningkatan dari Tahun 2018 sebesar 1.745.200 Kg menjadi 1.757.460 Kg atau peningkatan sebesar 0,70%. Meskipun mengalami peningkatan produksi dari tahun sebelumnya, namun peningkatan tersebut relatif kecil dan dibawah target peningkatan tahun 2019 sebesar 5%. Produksi perikanan budidaya Pada Tahun 2020 sebesar 809.032 kg atau mengalami penurunan dari Tahun 2019, namun nilai produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan dibanding Tahun 2019 . Penurunan produksi perikanan budidaya dikarenakan :

- Banyak lahan tambak yang tergenang air rob dan air hujan akibat limpasan dari kali gabus sehingga tambak tidak bias digunakan budidaya mulai bulan Pebruari, Mei, Juni, Oktober dan Desember .

Berikut tabel realisasi produksi perikanan budidaya Tahun 2020.

**Tabel 2.5 Realisasi PAD Bersumber dari TPI**

Tahun	Produksi (kg)	Nilai Produksi ( Rp)
2016	1.502.000	26.213.120.000
2017	1.625.208	22.631.340.000
2018	1.745.200	27.028.518.000
2019	1.757.460	29.404.036.000
2020	809.032	30.781.351.000

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

**(3) Program Pengembangan Technopark Perikanan**

Program ini diukur dengan 3 (tiga) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 2.6 Target dan Capaian Indikator  
Program Pengembangan Technopark Perikanan**

No	Indikator Program	Target 2020		Capaian 2020
		Angka	satuan	
1	Peningkatan tenant dan non tenant	50	tenant	50

*Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020*

Capaian target kinerja keluaran masing – masing kegiatan pada Urusan Kelautan dan Perikanan sesuai target dalam dokumentasi anggaran dan masalah yang dihadapi sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 559.609.000,00 dan realisasi 484.828.728,00 melalui 11 (sebelas) kegiatan dengan indikator output sebanyak 11 (sebelas) indikator tercapai dan 0 ( Nihil ) indikator tidak tercapai.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 427.749.000,00 dan realisasi Rp 402.303.030,00 melalui 6 ( Enam ) kegiatan dengan indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2020, 6 ( Enam ) indikator tercapai dan 0 ( Nihil ) indikator tidak tercapai.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 29.000.000,00 dan realisasi Rp 28.997.000,00 melalui 4 ( Empat ) kegiatan dengan indikator output sebanyak 4 ( Empat ) indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2020, 3 (Tiga) indikator tercapai dan 1 indikator refocusing.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dilaksanakan dengan alokai anggaran sebesar Rp 29.000.000,00 dan realisasi Rp 28.997.000,00 melalui 4 (Empat) kegiatan dengan indikator output sebanyak 4 (Empat) indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2020, 3 (Tiga) indikator tercapai dan 1 (Satu) indikator refocusing.

5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.407.663.000,00 dan realisasi Rp 4.131.276.227,00 melalui 5 (Lima) kegiatan dengan indikator output sebanyak 6 (Enam ) indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2020, 5 ( Lima ) Indikator tercapai dan 1 ( Satu ) Indikator direfocusing .

#### 6. Program Pengembangan Agribisnis

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 302.000.000,00 dan realisasi Rp 229.050.000,00 dengan 6 ( Enam ) kegiatan dengan indikator output sebanyak 8 (Delapan) indikator . Sampai dengan akhir Tahun 2020, 6 ( Enam ) indikator tercapai 3 (Tiga) indikator direfocusing.

#### 7. Program Pengembangan Teknopark Perikanan

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 524.850.000,00 dan realisasi Rp 510.046.500,00 dengan 4 ( Empat ) kegiatan dengan indikator output sebanyak 5 ( Lima ) indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2020, 5 ( Lima ) indikator tercapai dan 0 ( Nihil ) indikator tidak tercapai.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021, dapat dikemukakan bahwa permasalahan pelaksanaan kegiatan dari Tahun 2020 – 2021 yakni adanya refocusing dampak covid 19. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dalam pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, didasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Capaian evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel 2.7. dibawah ini :

Tabel 2.7

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian  
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kota Pekalongan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun 2019 (n-3)	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan SKPD s/d.2020 (Tahun lalu / n-2)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d. 2021		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6	9	10 = (5 + 7 + 9)	11 = 10 / 9	12
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>										
<b>325</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>										
<b>325.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>							
325.3-25.0.00.0.00.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	1.800.000	1.673.500	1.800.000	1.673.500	92,97	1.800.000	1.800.000	100	
325.3-25.0.00.0.00.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	195.000.000	161.000.643	195.000.000	161.000.643	82,56	195.000.000	195.000.000	100	
325.3-25.0.00.0.00.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	57.000.000	49.825.000	57.000.000	49.825.000	87,41	57.000.000	57.000.000	100	
325.3-25.0.00.0.00.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	109.200.000	108.765.700	109.200.000	108.765.700	99,60	109.200.000	109.200.000	100	

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021  
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan



325.3-25.0.00.0.00.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	21.500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000	100,00	21.500.000	21.500.000	100
325.3-25.0.00.0.00.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	100,00	7.500.000	7.500.000	100
325.3-25.0.00.0.00.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	100,00	7.500.000	7.500.000	100
325.3-25.0.00.0.00.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	100,00	4.250.000	4.250.000	100
325.3-25.0.00.0.00.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000	1.884.000	2.500.000	1.884.000	75,36	2.500.000	2.500.000	100
325.3-25.0.00.0.00.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	53.359.000	52.324.000	53.359.000	52.324.000	98,06	53.359.000	53.359.000	100
325.3-25.0.00.0.00.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	200.000.000	231.049.685	200.000.000	231.049.685	115,52	200.000.000	200.000.000	100
<b>325.21</b>	<b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>						

325.3-25.0.00.0.00.01.21.001	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Keluaran : Jumlah pelaksanaan bersih pantai; Keluaran : Jumlah terbinanya KUB di Kota Pekalongan.	69.800.000	48.255.000	69.800.000	48.255.000	69,13	69.800.000	69.800.000	100	
325.3-25.0.00.0.00.01.21.009	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	Keluaran : Jumlah Bulan sewa gedung dan pelataran TPI ; Keluaran : Jumlah Bulan Upah karyawan / karyawan TPI	2.450.000.000	2.513.460.021	2.450.000.000	2.513.460.021	102,59	2.450.000.000	2.450.000.000	100	
325.3-25.0.00.0.00.01.21.027	Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik	Keluaran : Jumlah pelaksanaan pelatihan istri nelayan. ; Keluaran : Jumlah pelaksanaan pelatihan nelayan	30.000.000	59.950.000	30.000.000	59.950.000	199,83	30.000.000	30.000.000	100	
325.3-25.0.00.0.00.01.21.028	Fasilitasi pendataan sarana dan prasarana statistik perikanan tangkap	Keluaran : Jumlah buku statistik perikanan tangkap. ; Keluaran : Jumlah pelaksanaan sosialisasi Pendataan Tangkap & Peraturan KP	37.275.000	43.800.000	37.275.000	43.800.000	117,51	37.275.000	37.275.000	100	
325.3-25.0.00.0.00.01.21.033	Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan	Keluaran : Jumlah pelaksanaan Pelatihan Basic Safety Training ( BST ) bagi nelayan	46.400.000	50.000.000	46.400.000	50.000.000	107,76	46.400.000	46.400.000	100	
<b>325.42</b>	<b>Program pengembangan agribisnis budidaya perikanan</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>							
325.3-25.0.00.0.00.01.42.001	Pengembangan bibit ikan unggul	Keluaran : Jumlah bulan operasional BBI	72.161.000	74.820.000	72.161.000	74.820.000	103,68	72.161.000	72.161.000	100	
325.3-25.0.00.0.00.01.42.002	Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan	Keluaran : Jumlah pelaksanaan lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan	43.250.000	44.200.000	43.250.000	44.200.000	102,20	43.250.000	43.250.000	100	
325.3-25.0.00.0.00.01.42.003	Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan	Keluaran : Jumlah pelaksanaan kontes ikan hias	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	100,00	75.000.000	75.000.000	100	

<b>SKPD</b>	<b>:</b>	<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>										
325.3-25.0.00.0.00.01.42.004		Gerakan Gemar Makan Ikan	Keluaran : Jumlah pelaksanaan gerakan gemar makan ikan	43.100.000	90.000.000	43.100.000	90.000.000	208,82	43.100.000	43.100.000	100	
325.3-25.0.00.0.00.01.42.010		Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan	Keluaran : jumlah sarpras budidaya yang diadakan ; Keluaran : Jumlah penyempurnaan jl. produksi tambak; Keluaran : Jumlah pakan ikan yang diadakan	0	0	282.000.000	0	0,00	282.000.000	282.000.000	100	
325.3-25.0.00.0.00.01.42.011		Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan	Keluaran : Jumlah lomba kinerja Pokdakan dan Poklasar yang dilaksanakan	43.000.000	50.000.000	43.000.000	50.000.000	116,28	43.000.000	43.000.000	100	
<b>325.43</b>		<b>Program pengembangan technopark perikanan</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>							
325.3-25.0.00.0.00.01.43.001		Fasilitasi Sarpras Technopark Perikanan (Bankeu)	Keluaran : Jumlah pembangunan Sarpras di Kawasan Technopark	950.000.000	0	950.000.000	0	0,00	950.000.000	950.000.000	100	
325.3-25.0.00.0.00.01.43.003		Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan	Keluaran : Jumlah Bintek Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB)/Cara Pembenihan Ikan Baik (CPIB) yang diselenggarakan	38.700.000	46.383.000	38.700.000	46.383.000	119,85	38.700.000	38.700.000	100	
325.3-25.0.00.0.00.01.43.004		Pengembangan Keterampilan Masyarakat Perikanan	Keluaran : jumlah pelatihan masyarakat perikanan	30.300.000	35.000.000	30.300.000	35.000.000	115,51	30.300.000	30.300.000	100	
325.3-25.0.00.0.00.01.43.005		Pengelolaan technopark perikanan	Keluaran : Jumlah bulan terbayarnya upah tenaga kegiatan; Keluaran : Jumlah sarpras yang terbangun	750.000.000	169.482.793	750.000.000	169.482.793	22,60	750.000.000	750.000.000	100	Penambahan biaya dikarenakan untuk memenuhi kekurangan fasilitas sarpras technopark antara lain untuk Pagar, Jalan,



## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.**

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan.

1. Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan adalah:

- (1) Tugas Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan mempunyai tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan mempunyai fungsi:
  - a) perumusan dan penetapan sasaran program urusan bidang kelautan dan perikanan;
  - b) pengkoordinasian penyediaan infrastruktur pendukung di bidang kelautan dan perikanan serta penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
  - c) pembinaan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan;
  - d) penetapan program penyuluhan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
  - e) penyelenggaraan penataan, pengembangan dan pengawasan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
  - f) pembinaan produksi di bidang kelautan dan perikanan dan pengawasan mutu serta peredaran benih/bibit ikan;
  - g) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelelangan ikan;
  - h) pengendalian dan pemberdayaan nelayan kecil;

- i) penetapan pemberian rekomendasi izin usaha perikanan dan penerbitan surat pencatatan usaha penangkapan ikan dan pembinaan pembudidayaan ikan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
  - j) pengkoordinasian fasilitasi riset dan pemagangan di bidang kelautan dan perikanan;
  - k) pengarah dan pengkoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
  - l) pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan program dan pelaksanaan kegiatan; dan
  - m) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengantugas dan fungsinya.
- (3) Struktur Organisasi Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
    - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perikanan Tangkap
    - 1. Seksi Kenelayanan;
    - 2. Seksi Alat dan Kapal Penangkapan Ikan; dan
    - 3. Seksi Sarana dan Prasarana PerikananTangkap.
  - d. Bidang Perikanan Budidaya
    - 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya;
    - 2. Seksi Lingkungan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pakan;dan
    - 3. Seksi Produksi Perikanan Budidaya.
  - e. UPTD.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2. Kondisi Sumber Daya Manusia.

Jumlah pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, sampai dengan 31 Desember 2020 berjumlah 29 orang.

- (1) Sumber Daya Manusia SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Jumlah PNS SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan**  
**Menurut Golongan**

No.	Golongan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Golongan I	0	0	0	0
2	Golongan II	8	8	27,59	27,59
3	Golongan III	15	15	51,72	44,83
4	Golongan IV	6	8	20,69	27,58
	<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 2.3**  
**Rekapitulasi Jumlah PNS SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2019	Tahun 2020
1	SD	0	0	0,00	0,00
2	SLTP	3	3	10,34	10,34
3	SLTA	8	8	27,59	27,59
4	DIPLOMA I	0	0	0,00	0,00
5	DIPLOMA II	0	0	0,00	0,00
6	DIPLOMA III	2	2	6,90	6,90
7	DIPLOMA IV	0	0	0,00	0,00
8	S-1	13	13	44,83	41,38
9	S-2	3	3	10,34	13,79
10	S-3	0	0	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Pejabat Struktural SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan**  
**Berdasarkan Tingkat Eselon**

No	Tingkat Eselon	Jumlah		Prosentase (%)	
		2019	2020	2019	2020
1	II.A	0	0	6,67	6,67
2	II.B	1	1	0,00	0,00
3	III.A	1	1	6,67	6,67
4	III.B	2	2	13,33	13,33
5	IV.A	9	9	60,00	60,00
6	IV.B	2	2	13,33	13,33
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

3. Kondisi Sarana dan Prasarana Sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan memiliki sarana prasarana adalah:

(1) Sarana tidak bergerak berupa

**Tabel 2.5**  
**Rekapitulasi Sarana tidak Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan**

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)
1	Tanah	4
2	Gedung dan bangunan	40
3	Jalan Irigasi dan jaringan	42

(2) Sarana bergerak berupa :

**Tabel 2.6**  
**Rekapitulasi Sarana Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan**

No	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
1	Tanah	4
2	Alat Besar	2
3	Pompa Air	2
4	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Stasion Wagon)	4
5	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Pick Up)	3
6	Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain	1
7	Sepeda Motor	24

8	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	1
9	Kendaraan tak Bermotor Angkut Barang (Gerobak Tarik)	53
10	Kendaraan tak Bermotor Angkut Barang (Gerobak Dorong)	64
11	Battery Charge	1
12	Tool Kit Set	1
13	Scaffolding Set & Tool	3
14	Global Positioning System	2
15	Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya)	2
16	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	7
17	Timbangan Bbi Kapasitas 100 Kg	7
18	Timbangan Cepat Kapasitas 200 Kg	5
19	Timbangan Biasa	21
20	Alat Timbangan Lain-lain	5
21	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1
22	Lemari Penyimpan	4
23	Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)	1
24	Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain	7
25	Alat Produksi Perikanan	4
26	Alat-alat Peternakan Lain-lain	23
27	Mesin Ketik Manual	5
28	Mesin Hitung Listrik	8
29	Mesin Kas Register	10
30	Mesin Hitung/Jumlah Lain-lain	4
31	Lemari Besi/Metal	6
32	Lemari Kayu	18
33	Rak Besi	2
34	Rak Kayu	2
35	Filing Cabinet Besi	8
36	Kardex Besi	1
37	Lemari Kaca	2
38	Papan Visual/Papan Nama	2
39	White Board	1
40	Mesin Absensi	4
41	Overhead Projector	1
42	Papan Nama Instansi	7
43	Papan Pengumuman	5
44	Papan Tulis	1
45	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	5
46	Meja Kerja Besi/Metal	4
47	Meja Kerja Kayu	27

48	Kursi Besi/Metal	18
49	Kursi Kayu	22
50	Meja Rapat	7
51	Meja Resepsionis	1
52	Meja Tambahan	4
53	Meja Panjang	9
54	Kasur/Spring Bed	60
55	Kursi Rapat	238
56	Kursi Tamu	12
57	Kursi Putar	2
58	Kursi Lipat	10
59	Meja Komputer	5
60	Sofa	5
61	Meja Biro	2
62	Meja Tulis	19
63	Mesin Pemotong Rumput	6
64	Lemari Es	6
65	A.C. Window	22
66	A.C. Split	6
67	Kipas Angin	9
68	Exhaust Fan	2
69	Reach In Freezer	2
70	Kompor Gas (Alat Dapur)	1
71	Tabung Gas	1
72	Alat Dapur Lainnya	4
73	Televisi	6
74	Loudspeaker	16
75	Sound System	6
76	Wireless	5
77	Microphone	1
78	Camera Video	18
79	Tiang Bendera	2
80	Tangga Aluminium	4
81	Dispenser	16
82	Mimbar/Podium	1
83	Handy Cam	4
84	Gordy/Kray	20
85	Alat Rumah Tangga Lain-lain	5
86	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3
87	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1
88	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	27
89	Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon II	1
90	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1

91	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
92	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3
93	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	7
94	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	19
95	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	8
96	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	6
97	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	12
98	Compact Disc Player	2
99	Talk Back Unit	10
100	Microphone/Wireless MIC	12
101	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6
102	Power Amplifier	5
103	Proyektor + Attachment	7
104	Peralatan studio Visual Lain-lain	3
105	Off Air TV Monitor	1
106	Camera Electronic	13
107	Camera Film	1
108	Alat Kkomunikasi Telephon	5
109	Antene SHF Stationary	1
110	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	7
111	D.O. Meter	1
112	Alat Laboratorium Hidro Kimia Lain-Lain	3
113	Unconfinet Soil Test	1
114	Microscope	1
115	PH Meter	1
116	Alat Pembuat Pelet	1
117	Alat Laboratorium Kimia Lain-lain	1
118	Freezer (Alat Laboratorium Patologi)	19
119	Cooler (Alat Laboratorium Makanan)	64
120	Pompa Airasil	6
121	Refractometer	2
122	Tester Kit	3
123	Thermometer 0.0 - 100.0 C	1
124	Soil PH Meter	3
125	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air	2
126	Refractometer	3
127	PH Meter	3
128	KOMPUTER JARINGAN Lain-lain	1
129	P.C Unit	20
130	Lap Top	27
131	Note Book	14
132	Hard Disk	9
133	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1

134	Monitor	1
135	Printer (Peralatan Personal Komputer)	50
136	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6
137	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	8
138	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	3
139	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	11
140	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	4
141	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	8
142	Bangunan Tempat Parkir	1
143	Bangunan Gedung Pabrik Lain-lain	1
144	Monumen	1
145	Tugu Peringatan Lainnya	1
146	Jalan dan Jembatan	7
147	Bangunan Air	16
148	Bangunan Pengairan Pasang Surut	12
149	Jaringan Air Minum	5
150	Jaringan Listrik	8
151	Jaringan Telephon Diatas Tanah	1
152	Bahan Perpustakaan	106
153	Bahan Perpustakaan Tercetak	101
154	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1

#### 4. Permasalahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat, tetapi hanya sebagian saja usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini. Kecilnya realisasi dari usulan tersebut disebabkan keterbatasan anggaran sehingga berdasarkan penentuan skala prioritas dan kebijakan yang ada.

Menurut Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2018, DKP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan Berdasarkan perwal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan mengampu 1 (satu) urusan yaitu urusan pilihan kelautan dan perikanan.

Pada Tahun 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan melaksanakan 7 program dan 38 kegiatan dengan 6 (enam) capaian indikator sebagai berikut :

##### 1. *Program Pengembangan Perikanan Tangkap*

Program ini diukur dengan 3 (tiga) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Target dan Capaian Indikator  
Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

No	Indikator Program	Target 2020		Capaian 2019	Capaian 2020
		Angka	satuan		
1	Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	1,95	persen	13,23	-0,41
2	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	1,95	Rp. Milyar	13,23	-0,41
3	Nelayan yang dibina	8	persen	11,83	14,64

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

*Ad. Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap*

Nilai produksi perikanan tangkap di TPI Kota Pekalongan menunjukkan angka yang fluktuatif. Hal ini bisa dilihat pada kurun waktu 2017 jumlah nilai produksi ikan tangkap sebesar Rp 164.608.434.000,00 pada tahun 2018 menurun menjadi Rp 156.811.357.000,00. Namun demikian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp 177.561.710.000,00 atau terjadi **peningkatan** nilai produksi perikanan tangkap sebesar Rp. 20,8 Milyar (13.23%) melebihi target Tahun 2019 sebesar 2%, Pada Tahun 2020 untuk peningkatan nilai produksi perikanan tidak memenuhi target yakni target 1,95 % realisasi hanya -0,41 %. Berikut kami sampaikan tabel nilai produksi perikanan tangkap di TPI Kota Pekalongan dari Tahun 2015 sampai dengan 2020.

**Tabel 2.8 Nilai Produksi Perikanan Tangkap di TPI Kota Pekalongan**

Tahu	Produksi (kg)	Nilai Produksi (Rp)
2015	14.730.900	188.579.000.000
2016	15.641.111	209.626.606.000
2017	10.474.512	164.608.434.000
2018	10.980.029	156.811.357.000
2019	14.991.858	177.561.710.000
2020	13.887.554	176.838.757.000

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

### ***Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI***

Pada Tahun 2018 realisasi PAD sebesar 4.704.340.710,- dan Tahun 2019 realisasi sebesar Rp. 5.326.851.300,- mengalami peningkatan sebesar 13,23% melebihi target Tahun 2019 sebesar 2%. Pada Tahun 2020 capaian kinerja peningkatan pendapatan daerah bersumber dari TPI dengan target 1,95% realisasi hanya – 0,41% . Tidak tercapainya kinerja peningkatan nilai produksi perikanan tangkap dan Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI hal ini dikarenakan :

- Sering terjadi banjir rob di parkir truk ;
- Tahun 2020 suplai ikan dari truk (dari Juwana) turun 43,9%, adapun dari kapal sebenarnya mengalami kenaikan (13,06%).

Berikut tabel realisasi PAD bersumber dari TPI Tahun 2020.

**Tabel 2.9 Realisasi PAD Bersumber dari TPI**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>
2015	5.621.298.630
2016	6.288.798.180
2017	4.938.253.020
2018	4.704.340.710
2019	5.326.851.300
2020	5.305.162.730

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

### **2. Program Pengembangan Agribisnis Budidaya Perikanan**

Program ini diukur dengan 3 (tiga) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 2.10 Target dan Capaian Indikator Program Pengembangan Agribisnis Budidaya Perikanan**

No	Indikator Program	Target 2020		Capaian 2020
		Angka	satuan	
1	Peningkatan produksi perikanan budidaya	0	persen	-53,97
2	peningkatan konsumsi makan ikan	6	persen	8,10
3	persentase pembudidaya yang dibina	30	persen	29,81

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

### 3. Peningkatan produksi perikanan budidaya

Produksi perikanan budidaya Tahun 2019 mengalami peningkatan dari Tahun 2018 sebesar 1.745.200 Kg menjadi 1.757.460 Kg atau peningkatan sebesar 0,70%. Meskipun mengalami peningkatan produksi dari tahun sebelumnya, namun peningkatan tersebut relatif kecil dan dibawah target peningkatan tahun 2019 sebesar 5%. Produksi perikanan budidaya Pada Tahun 2020 sebesar 809.032 kg atau mengalami penurunan dari Tahun 2019, namun nilai produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan dibanding Tahun 2019 . Penurunan produksi perikanan budidaya dikarenakan :

- Banyak lahan tambak yang tergenang air rob dan air hujan akibat limpasan dari kali gabus sehingga tambak tidak bias digunakan budidaya mulai bulan Pebruari, Mei, Juni, Oktober dan Desember .

Berikut tabel realisasi produksi perikanan budidaya Tahun 2020.

**Tabel 2.11 Realisasi PAD Bersumber dari TPI**

Tahun	Produksi (kg)	Nilai Produksi ( Rp)
2016	1.502.000	26.213.120.000
2017	1.625.208	22.631.340.000
2018	1.745.200	27.028.518.000
2019	1.757.460	29.404.036.000
2020	809.032	30.781.351.000

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

### Program Pengembangan Technopark Perikanan

Program ini diukur dengan 3 (tiga) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 2.12 Target dan Capaian Indikator  
Program Pengembangan Technopark Perikanan**

No	Indikator Program	Target 2020		Capaian 2020
		Angka	satuan	
1	Peningkatan tenant dan non tenant	50	tenant	50

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

**Tabel 2.14 Pencapaian Kinerja Pelayanan DKP Kota Pekalongan Tahun 2020  
Target Dan Proyeksi Tahun 2021 dan Tahun 2022**

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2018	2019	2020	2021	2019	2020	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap			2%	2%	2%	1,95%	13,23	13,23			
2	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI			2%	2%	2%	1,95%	13,23	13,23			
3	Nelayan yang dibina			8%	8%	8%	8%	11,83	11,83			
4	Peningkatan produksi perikanan budidaya			5%	5%	5%	5%	0,7	0,7			
5	peningkatan konsumsi makan ikan			6%	6%	6%	6%	5,95	5,95			
6	persentase pembudidaya yang dibina			30%	30%	30%	30%	31,66	31,66			
7	Peningkatan tenant dan non tenant			50%	50%	50%	50%	57	57			

### 2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kewajiban daerah di bidang kelautan dan perikanan menghadapi beberapa tantangan mengenai kebijakan kelautan dan perikanan daerah dan dinamika persoalan yang lain yang ditemui dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan menetapkan isu kritis/strategis dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

- a) Sering terjadi banjir rob di parkir truk ;
- b) Tingginya laju sedimentasi yang menyebabkan pendangkalan sehingga kapal – kapal kesulitan masuk pada musim hujan;
- c) Adanya pembangunan bendung gerbang penahan rob yang aktifitas docking dan galangan kapal ditutup;
- d) Kurangnya infrastruktur dan sarpras dalam proses pendaratan dan pelelangan ikan di TPI ;
- e) Masih minimnya hasil tangkapan ikan oleh nelayan kecil ;
- f) Kurangnya Infrastruktur, sarpras perikanan budidaya yang memadai ;
- g) Kurangnya penerapan teknologi budidaya yang adaptif ;
- h) Kurangnya kualitas SDM pembudidaya perikanan;
- i) Kurangnya modal kelompok pembudidaya;
- j) Masih rendahnya pendapatan & kesejahteraan pembudidaya ;
- k) Masih rendahnya kualitas SDM pembudidaya perikanan;
- l) Kurangnya sosialisasi konsumsi ikan kepada masyarakat;
- m) Masih rendahnya kualitas SDM nelayan kecil ;
- n) Belum optimalnya penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
- o) Belum optimalnya penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan ;
- p) Kurang optimalnya dukungan ketercukupan Sarpras Aparatur ;

#### **2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD**

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipasif.

## REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020 KOTA PEKALONGAN

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan			
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp 000)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				5.086.683.000	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			4.660.845.000
325	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				5.086.683.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			4.660.845.000
325,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 : Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi	100 persen	559.609.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		0 persen	659.609.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	DKP Kota Pekalongan	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	1.800.000	Penyediaan jasa surat menyurat	DKP Kota Pekalongan	12 Bulan	1.800.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DKP Kota Pekalongan (Jl. WR Supratman) 2 gedung (workshop & Gedung DKP), PIM (Jl. Kesambi Raya-Kdg Pjg), Kawasan Technopark - Jl. WR Supratman (4	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	195.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DKP Kota Pekalongan (Jl. WR Supratman) 2 gedung (workshop & Gedung DKP), PIM (Jl. Kesambi Raya-Kdg Pjg), Kawasan Technopark - Jl. WR Supratman (4	12 Bulan	195.000.000

		gedung), BBI Kuripan (Jl. Hos Cokroaminoto-Yosorejo)					gedung), BBI Kuripan (Jl. Hos Cokroaminoto-Yosorejo)		
325.3- 25.0.00.0.00.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	DKP Kota Pekalongan	Keluaran : jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	57.000.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	DKP Kota Pekalongan	12 Bulan	57.000.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DKP Kota Pekalongan (Jl. WR Supratman) 2 gedung (workshop & Gedung DKP), PIM (Jl. Kesambi Raya-Kdg Pjg), Kawasan Technopark - Jl. WR Supratman (4 gedung), BBI Kuripan (Jl. Hos Cokroaminoto-Yosorejo)	Keluaran : jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 Bulan	109.200.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DKP Kota Pekalongan (Jl. WR Supratman) 2 gedung (workshop & Gedung DKP), PIM (Jl. Kesambi Raya-Kdg Pjg), Kawasan Technopark - Jl. WR Supratman (4 gedung), BBI Kuripan (Jl. Hos Cokroaminoto-Yosorejo)	12 Bulan	109.200.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	DKP Kota Pekalongan	Keluaran : jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 Bulan	21.500.000	Penyediaan alat tulis kantor	DKP Kota Pekalongan	12 Bulan	21.500.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DKP Kota Pekalongan	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	7.500.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DKP Kota Pekalongan	12 Bulan	7.500.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DKP Kota Pekalongan	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	7.500.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DKP Kota Pekalongan	12 Bulan	7.500.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	DKP Kota Pekalongan	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	4.250.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	DKP Kota Pekalongan	12 Bulan	4.250.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DKP Kota Pekalongan	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	2.500.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DKP Kota Pekalongan	12 Bulan	2.500.000

325.3- 25.0.00.0.00.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	DKP Kota Pekalongan (BBI, Technopark, DKP)	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 Bulan	53.359.000	Penyediaan makanan dan minuman	DKP Kota Pekalongan (BBI, Technopark, DKP)	11 Bulan	53.359.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Pekalongan	Keluaran : Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	100 Orang/kali	100.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Pekalongan	100 Orang/kali	200.000.000
<b>325,02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		1 : Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga	100 persen	<b>626.574.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		0 persen	<b>496.300.000</b>
325.3- 25.0.00.0.00.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DKP Kota Pekalongan	Keluaran : jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	2 Unit	50.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DKP Kota Pekalongan	2 Unit	50.000.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas / operasional	DKP Kota Pekalongan	Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	34 Unit	97.574.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas / operasional	DKP Kota Pekalongan	34 Unit	100.000.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.02.034	Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat	DKP Kota Pekalongan	Keluaran : Jumlah alat berat yang terpelihara secara rutin/berkala dan beroperasi	1 Unit	16.000.000	Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat	DKP Kota Pekalongan	1 Unit	16.800.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DKP Kota Pekalongan	Keluaran : jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat	1 unit	403.000.000	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DKP Kota Pekalongan	1 unit	232.000.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.02.058	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	DKP Kota Pekalongan	Keluaran : jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 Unit	37.500.000	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	DKP Kota Pekalongan	1 Unit	75.000.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.02.059	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	DKP Kota Pekalongan (Jl. Yos Sudarso -46)	Keluaran : Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan	12 Bulan	22.500.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	DKP Kota Pekalongan (Jl. Yos Sudarso -46)	12 Bulan	22.500.000

			perlengkapan gedung kantor						
<b>325,06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		1 : Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	5 dokumen	<b>32.000.000</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		0 dokumen	<b>29.000.000</b>
325.3- 25.0.00.0.00.01.06.005	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	Keluaran : Jumlah dokumen Renja yang disusun  Keluaran : Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun	2 dokumen  4 dokumen	5.500.000	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	2 dokumen  4 dokumen	8.000.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	Keluaran : Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan) Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	2 dokumen  1 dokumen	5.000.000	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	0 dokumen  0 dokumen	7.500.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.06.008	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	Keluaran : Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun Keluaran : Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah	5 dokumen  12 Bulan	13.500.000	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	DKP Kota Pekalongan	5 dokumen  12 Bulan	13.500.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.06.009	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah		Keluaran : Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun	1 dokumen	8.000.000	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah		1 dokumen	0
<b>325,07</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)</b>		1 : Pengaduan yang diterima	0 kasus	<b>12.250.000</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)</b>		0 kasus	<b>15.000.000</b>
325.3-	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Kota pekalongan	Keluaran : Jumlah keikutsertaan dalam hari jadi, pameran hakteknas dan pekan batik	3 Kegiatan	12.250.000	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Kota pekalongan	3 Kegiatan	15.000.000
<b>325,21</b>	<b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>		1 : Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	0 Rp. Milyar	<b>2.567.250.000</b>	<b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>		0 Rp. Milyar	<b>2.557.075.000</b>

			2 : Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap 3 : Nelayan yang dibina	0 persen 0 persen				0 persen 0 persen	
325.3- 25.0.00.0.00.01.21.001	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Kota Pekalongan	Keluaran : Jumlah terbinanya KUB di Kota Pekalongan.	33 KUB	32.250.000	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Kota Pekalongan	33 KUB	69.800.000
325.3-	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	TPI Kota Pekalongan .	Keluaran : Jumlah Bulan Upah karyawan / karyawati TPI Keluaran : Jumlah Bulan sewa gedung dan pelataran TPI	12 Bulan 12 Bulan	2.508.000.000	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	TPI Kota Pekalongan .	12 Bulan 12 Bulan	2.450.000.000
325.3-	Fasilitasi pendataan sarana dan prasarana statistik perikanan tangkap	DKP Kota Pekalongan	Keluaran : Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan KP Keluaran : Jumlah Laporan Statistik	1 kali 1 buku	27.000.000	Fasilitasi pendataan sarana dan prasarana statistik perikanan tangkap	DKP Kota Pekalongan	1 kali 12 buku	37.275.000
<b>325,42</b>	<b>Program pengembangan agribisnis budidaya perikanan</b>		1 : Peningkatan produksi perikanan budidaya 2 : peningkatan konsumsi makan ikan 3 : persentase pembudidaya yang dibina	5 persen 6 persen 30 persen	<b>484.000.000</b>	<b>Program pengembangan agribisnis budidaya perikanan</b>		0 persen 0 persen 0 persen	<b>115.161.000</b>
325.3-	Pengembangan bibit ikan unggul	BBI Kota Pekalongan	Keluaran : Jumlah Pengadaan Pakan Ikan Induk Keluaran : Jumlah Pengadaan Pakan Benih	450 Kg 200 kg	162.000.000	Pengembangan bibit ikan unggul	BBI Kota Pekalongan	600 Kg 0 kg	72.161.000
325.3-	Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan		Keluaran : Jumlah benih ikan yang diadakan Keluaran : Jumlah Rehabilitasi kolam/tambak Keluaran : Jumlah Pakan Ikan yang diadakan	20000 ekor 1 Pekerjaan 1000 kg	281.000.000	Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan		0 ekor 0 Pekerjaan 0 kg	0

			Keluaran : Jumlah Bibit Rumput Laut yang diadakan	10000 kg				0 kg	
325.3- 25.0.00.0.00.01.42.011	Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan	Kota Pekalongan	Keluaran : Jumlah kategori lomba kinerja Pokdakan dan Poklasar yang dilaksanakan	4 kategori	41.000.000	Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan	Kota Pekalongan	4 kategori	43.000.000
<b>325,43</b>	<b>Program pengembangan technopark perikanan</b>		1 : Peningkatan tenant dan non tenant	50 tenant	<b>805.000.000</b>	<b>Program pengembangan technopark perikanan</b>		0 tenant	<b>788.700.000</b>
325.3-	Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan	Kota Pekalongan	Keluaran : Jumlah Bintek Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB)/Cara Pembenihan Ikan Baik (CPIB) yang diselenggarakan	3 kali	23.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan	Kota Pekalongan	3 kali	38.700.000
325.3-	Pengelolaan technopark perikanan	Kota Pekalongan	Keluaran : Jumlah terpeliharanya kawasan technopark	1 kawasan	782.000.000	Pengelolaan technopark perikanan	Kota Pekalongan	1 kawasan	750.000.000

325.3- 25.0.00.0.00.01.07.014	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Keluaran : Jumlah keikutsertaan dalam hari jadi, pameran hakteknas dan pekan batik	Kota pekalongan	3 Kegiatan	12.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Kegiatan	15.000.000
<b>325,21</b>	<b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>	1 : Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI 2 : Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap 3 : Nelayan yang dibina		0 Rp. Milyar 0 persen 0 persen	<b>2.567.250.000</b>			0 Rp. Milyar 0 persen 0 persen	<b>2.557.075.000</b>
325.3- 25.0.00.0.00.01.21.001	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Keluaran : Jumlah terbinanya KUB di Kota Pekalongan.	Kota Pekalongan	33 KUB	32.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		33 KUB	69.800.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.21.009	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	Keluaran : Jumlah Bulan Upah karyawan / karyawan TPI Keluaran : Jumlah Bulan sewa gedung dan pelataran TPI	TPI Kota Pekalongan .	12 Bulan  12 Bulan	2.508.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Bulan  12 Bulan	2.450.000.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.21.028	Fasilitasi pendataan sarana dan prasarana statistik perikanan tangkap	Keluaran : Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan KP  Keluaran : Jumlah Laporan Statistik	DKP Kota Pekalongan	1 kali  1 buku	27.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kali  12 buku	37.275.000
<b>325,42</b>	<b>Program pengembangan agribisnis budidaya perikanan</b>	1 : Peningkatan produksi perikanan budidaya 2 : peningkatan konsumsi makan ikan 3 : persentase pembudidaya yang dibina		5 persen 6 persen 30 persen	<b>484.000.000</b>			0 persen 0 persen 0 persen	<b>115.161.000</b>
325.3- 25.0.00.0.00.01.42.001	Pengembangan bibit ikan unggul	Keluaran : Jumlah Pengadaan Pakan Ikan Induk Keluaran : Jumlah Pengadaan Pakan Benih	BBI Kota Pekalongan	450 Kg  200 kg	162.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		600 Kg  0 kg	72.161.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.42.010	Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan	Keluaran : Jumlah benih ikan yang diadakan  Keluaran : Jumlah Rehabilitasi kolam/tambak		20000 ekor  1 Pekerjaan	281.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0 ekor  0 Pekerjaan	0

		Keluaran : Jumlah Pakan Ikan yang diadakan		1000 kg				0 kg	
		Keluaran : Jumlah Bibit Rumput Laut yang diadakan		10000 kg				0 kg	
325.3- 25.0.00.0.00.01.42.011	Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan	Keluaran : Jumlah kategori lomba kinerja Pokdakan dan Poklasar yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	4 kategori	41.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 kategori	43.000.000
<b>325,43</b>	<b>Program pengembangan technopark perikanan</b>	1 : Peningkatan tenant dan non tenant		50 tenant	<b>805.000.000</b>			0 tenant	<b>788.700.000</b>
325.3- 25.0.00.0.00.01.43.003	Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan	Keluaran : Jumlah Bintek Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB)/Cara Pembenihan Ikan Baik (CPIB) yang diselenggarakan	Kota Pekalongan	3 kali	23.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 kali	38.700.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.43.005	Pengelolaan technopark perikanan	Keluaran : Jumlah terpeliharanya kawasan technopark	Kota Pekalongan	1 kawasan	782.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Penambahan biaya dikarenakan untuk memenuhi kekurangan fasilitas sarpras technopark antara lain untuk Pagar, Jalan, Drainase.	1 kawasan	750.000.000







## BAB. III

### TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpilih pada periode ini, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2015-2019 sebagai berikut: **“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”** .

**Gotong royong** merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan suatu perihal dan gotong royong dalam bekerja. Kekuatan rakyat adalah gotong royong, dimana rakyat selalu bahu membahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan. **Berdaulat** adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan selain sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai Negara merdeka, pembangunan juga merupakan upaya membangun kemandirian. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan kemampuan nasional di segala lini baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. **Kemandirian** suatu bangsa tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari

dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok **Kemandirian dalam kebudayaan** harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, namun kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam pelaksanaan agenda prioritas nasional tersebut, maka dirumuskanlah kebijakan pengembangan wilayah pulau-pulau besar yang diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa

Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah sebagai satu kesatuan Negara yang berkeadilan.

Pencapaian keberhasilan pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pencapaian pembangunan-pembangunan di daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing menjadi modal dasar dan kekuatan utama bangsa dalam membangun kemajuan dan kemandirian.

Terkait hal tersebut, pengembangan wilayah menjadi cukup penting dan fundamental dalam mengoptimalkan setiap potensi daerah baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bersama-sama menciptakan kesejahteraan yang berkualitas dan merata. Pengembangan setiap wilayah di Negara Republik Indonesia ini tergambar jelas pada misi pembangunan jangka menengah nasional dan dipertegas melalui agenda prioritas NAWA CITA yang selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan nasional pengembangan wilayah. Isu utama dalam pembangunan kewilayahan adalah kesenjangan antara kawasan Indonesia bagian barat dengan kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, arah kebijakan terkait pengembangan wilayah akan difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan di wilayah kawasan barat Indonesia, dimana salah satunya adalah wilayah Jawa-Bali. Dalam Arah Pengembangan Wilayah Jawa-Bali RPJMN Tahun 2015-2019, terdapat inventarisasi atas Potensi dan Keunggulan Wilayah dimana Kota Pekalongan menjadi salah satu potensi sektor pariwisata dan ekonomi nasional berupa industri kreatif di bidang Desain, Fesyen, Kerajinan. Di dalam RPJMN juga telah diinventarisir profil kerawanan dan resiko untuk Kota Pekalongan berupa tanah longsor, kebakaran, banjir. Sedangkan dalam rencana program dan kegiatan strategis Jangka Menengah Nasional berupa : 1) Pembangunan Jalan Lingkar Pekalongan dan 2) Pembangunan Jaringan Air Baku Petanglong (Tahap I dan Tahap II) Pekalongan. Selain itu, dalam rangka

mendukung keberhasilan Pemerintah dalam mewujudkan sasaran pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berupa pembangunan 100 *Techno Park* di kabupaten/kota, Pemerintah Kota Pekalongan merupakan salah satu lokasi pembangunan *techno park* dimaksud, yaitu melalui rencana pembangunan Teknopark Perikanan dan pembangunan Pusat Inovasi Budaya Batik.

## 1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dengan target indikator kinerja selama 5 (lima) tahun kebelakang (2016 – 2021) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 Kota Pekalongan, yaitu sebagai berikut:

4.1.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan yang hendak dicapai dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi perikanan ;
2. Meningkatkan nilai produksi perikanan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

4.1.2 Sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan yang hendak dicapai dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi dan nilai produksi perikanan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.2 dan 3.3 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.2 Tujuan dan Indikator Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi perikanan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	-	-	1%	1%	1%	1%
Meningkatkan nilai produksi perikanan	Persentase peningkatan nilai produksi perikanan	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	IKM	-	-	B	B	B	B

Tabel 3.3 Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Sasaran (IKU OPD)	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya produksi dan nilai produksi perikanan	Persentase capaian target pendapatan daerah bersumber dari TPI sebesar Rp. 5.5 Milyar	90,91	89,78	92,73%	94,55 %	96,36 %	100 %
	Nilai produksi perikanan tangkap	209,63	164,6	156,8	166,67	183,33	183,33
	Nilai produksi perikanan budidaya	22,5	22,88	22,95	23,41	23,88	24,36
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai Evaluasi AKIP	-	-	-	75	80	82,5
Meningkatkan Kualitas pelayanan publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	800	850	900

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa kegiatan yang terkandung didalamnya guna mencapai tujuan tertentu.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kelautan dan perikanan dipimpin oleh Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah Kota Pekalongan memiliki 1 (satu) sekretariat, 2 (dua) bidang, yaitu Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya serta 2 (Dua) Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD).

Dalam kaitannya dengan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan, pada tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan merencanakan akan mencapainya dengan melaksanakan 7 Program yang terdiri 39 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 6.180.969.000 (enam milyar seratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Pekalongan Pekalongan. Selanjutnya program dan kegiatan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan Tahun 2021 yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2021, tercantum dalam tabel 6. sebagai berikut:

Tabel 3.2. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DKP TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				<b>4.318.983.000</b>			<b>4.660.845.000</b>
<b>325</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>4.318.983.000</b>			<b>4.660.845.000</b>
<b>325.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1 : Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi		100 persen			0 persen	<b>659.609.000</b>
325.3-25.0.00.0.00.01.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	DKP Kota Pekalongan	12 Bulan	1.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	1.800.000
325.3-25.0.00.0.00.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	DKP Kota Pekalongan (Jl. 195.000.000 WR Supratman) 2 gedung (workshop & Gedung DKP), PIM (Jl. Kesambi Raya-Kdg Pjg), Kawasan Technopark - Jl. WR Supratman (4 gedung), BBI Kuripan (Jl. Hos Cokroaminoto-Yosorejo)	12 Bulan	195.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	195.000.000

325.3-25.0.00.0.00.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	DKP Kota Pekalongan	12 Bulan	57.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	57.000.000
325.3-25.0.00.0.00.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	DKP Kota Pekalongan	12 Bulan	109.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	109.200.000
325.3-25.0.00.0.00.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	DKP Kota Pekalongan	12 Bulan	21.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	21.500.000
325.3-25.0.00.0.00.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DKP Kota Pekalongan	12 Bulan	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	7.500.000
325.3-25.0.00.0.00.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DKP Kota Pekalongan	12 Bulan	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	7.500.000
325.3-25.0.00.0.00.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	DKP Kota Pekalongan	12 Bulan	4.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	4.250.000
325.3-25.0.00.0.00.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	DKP Kota Pekalongan	12 Bulan	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	2.500.000
325.3-25.0.00.0.00.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	DKP Kota Pekalongan	11 Bulan	53.359.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	11 Bulan	53.359.000
325.3-25.0.00.0.00.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	DKP Kota Pekalongan	100 Orang/kali	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Orang/kali	200.000.000
<b>325.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1 : Persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga		100 persen			0 persen	<b>496.300.000</b>

325.3- 25.0.00.0.00.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran : jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	DKP Kota Pekalongan	2 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	50.000.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	DKP Kota Pekalongan	34 Unit	97.574.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	34 Unit	100.000.000
325.3- 4.000.000 25.0.00.0.00.01.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Keluaran : Jumlah mebeleur yang Kota Pekalongan	DKP Kota Pekalongan	3 unit	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Unit	4.000.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.02.034	Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat	Keluaran : Jumlah alat berat yang terpelihara secara rutin/berkala dan beroperasi	DKP Kota Pekalongan	1 Unit	16.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	16.800.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Keluaran : jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat	DKP Kota Pekalongan	1 unit	232.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 unit	232.000.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.02.058	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	DKP Kota Pekalongan	5 Unit	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Unit	75.000.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.02.059	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	DKP Kota Pekalongan	12 Bulan	22.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	22.500.000
<b>325.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	1 : Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		5 dokumen			0 dokumen	<b>29.000.000</b>
325.3- 25.0.00.0.00.01.06.005	Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah dokumen Renja yang disusun	DKP Kota Pekalongan	2 dokumen	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 dokumen	8.000.000
		Keluaran : Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun		4 dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 dokumen	

325.3- 25.0.00.0.00.01.06.006	Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (Penetapan dan Perubahan)	DKP Kota Pekalongan	2 dokumen	7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 dokumen	7.500.000
		Keluaran : Jumlah laporan Keuangan SKPD yang disusun		1 dokumen			0 dokumen	
325.3- 8.500.000 25.0.00.0.00.01.06.007	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah dokumen profil PD yang disusun	DKP Kota Pekalongan	1 dokumen	8.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	8.500.000
325.3- 25.0.00.0.00.01.06.008	Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	DKP Kota Pekalongan	5 dokumen	13.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 dokumen	13.500.000
		Keluaran : Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah		12 Bulan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	
325.3- 25.0.00.0.00.01.06.009	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang disusun	DKP Kota Pekalongan	1 dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 dokumen	0
<b>325.07</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)</b>	1 : Pengaduan yang diterima		0 kasus			0 kasus	<b>15.000.000</b>
325.3- 25.0.00.0.00.01.07.014	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Keluaran : Jumlah keikutsertaan dalam hari jadi, pameran hakteknas dan pekan batik	DKP Kota Pekalongan	3 Kegiatan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 Kegiatan	15.000.000
<b>325.21</b>	<b>Program pengembangan perikanan tangkap</b>	1 : Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI		0 Rp. Milyar		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 Rp. Milyar	<b>2.557.075.000</b>
		2 : Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap		0 persen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 persen	
		3 : Nelayan yang dibina		0 persen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 persen	

325.3- 25.0.00.0.00.01.21.001	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Keluaran : Jumlah terbinanya KUB di Kota Pekalongan.	DKP Kota Pekalongan	33 KUB	69.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	33 KUB	69.800.000
----------------------------------	--	--	---------------------	--------	------------	--------------------------------------	--------	------------

325.3- 25.0.00.0.00.01.21.009	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	Keluaran : Jumlah Bulan Upah karyawan / karyawati TPI	DKP Kota Pekalongan	12 Bulan	2.450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	2.450.000.000
		Keluaran : Jumlah Bulan sewa gedung dan pelataran TPI		12 Bulan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Bulan	
325.3- 30.000.000 25.0.00.0.00.01.21.027	Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik	Keluaran : Jumlah pelaksanaan Kota Pekalongan pelatihan nelayan	DKP Kota Pekalongan	2 kali	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 kali	30.000.000
		Keluaran : Jumlah pelaksanaan pelatihan istri nelayan		2 kali			2 kali	
325.3- 25.0.00.0.00.01.21.028	Fasilitasi pendataan sarana dan prasarana statistik perikanan tangkap	Keluaran : Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan KP	DKP Kota Pekalongan	1 kali	37.275.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 kali	37.275.000
		Keluaran : Jumlah Laporan Statistik		1 buku		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 buku	
<b>325.42</b>	<b>Program pengembangan agribisnis budidaya perikanan</b>	1 : Peningkatan produksi perikanan budidaya		5 persen			0 persen	<b>115.161.000</b>
		2 : peningkatan konsumsi makan ikan		6 persen			0 persen	
		3 : persentase pembudidaya yang dibina		30 persen			0 persen	
325.3- 25.0.00.0.00.01.42.001	Pengembangan bibit ikan unggul	Keluaran : Jumlah Pengadaan Pakan Ikan Induk	DKP Kota Pekalongan	450 Kg	72.161.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	600 Kg	72.161.000
		Keluaran : Jumlah Pengadaan Pakan Benih	DKP Kota Pekalongan	200 kg			0 kg	
325.3- 25.0.00.0.00.01.42.010	Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan	Keluaran : Jumlah benih ikan yang diadakan	DKP Kota Pekalongan	20000 ekor	282.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0 ekor	132.000.000
		Keluaran : Jumlah Rehabilitasi kolam/tambak		1 Pekerjaan			0 Pekerjaan	
		Keluaran : Jumlah Pakan Ikan yang diadakan		1000 kg			0 kg	

		Keluaran : Jumlah Bibit Rumput Laut yang diadakan		10000 kg			0 kg	
325.3-25.0.00.0.00.01.42.002	Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan	Keluaran : Jumlah pelaksanaan Kota Pekalongan lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan	DKP Kota Pekalongan	1 kl	43.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 kali	43.250.000
325.3-25.0.00.0.00.01.42.004	Gerakan Gemar Makan Ikan	Keluaran : Jumlah pelaksanaan Kota Pekalongan gerakan gemar makan ikan	DKP Kota Pekalongan	10 Sekolah	43.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Sekolah	43.100.000
325.3-25.0.00.0.00.01.42.003	Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan	Keluaran : Jumlah pelaksanaan kontes ikan hias	DKP Kota Pekalongan	2 jenis	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 jenis	75.000.000
325.3-25.0.00.0.00.01.42.017	Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan	Keluaran : Jumlah Bibit Rumput Laut yang diadakan	DKP Kota Pekalongan	1000	282.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		132.000.007
		Keluaran : Jumlah penyempurnaan jl. produksi tambak		1 pekerjaan			0 pekerjaan	
		Keluaran : jumlah sarpras budidaya yang diadakan		1 unit			0 unit	
325.3-25.0.00.0.00.01.42.011	Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan	Keluaran : Jumlah kategori lomba kinerja Pokdakan dan Poklasar yang dilaksanakan	DKP Kota Pekalongan	4 kategori	43.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 kategori	43.000.000
<b>325.43</b>	<b>Program pengembangan technopark perikanan</b>	1 : Peningkatan tenant dan non tenant		50 tenant			0 tenant	<b>788.700.000</b>
325.3-25.0.00.0.00.01.43.003	Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan	Keluaran : Jumlah Bintek Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB)/Cara Pembenihan Ikan Baik (CPIB) yang diselenggarakan	DKP Kota Pekalongan	3 kali	38.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 kali	38.700.000
325.3-25.0.00.0.00.01.43.005	Pengelolaan technopark perikanan	Keluaran : Jumlah terpeliharanya kawasan technopark	DKP Kota Pekalongan	1 kawasan	750.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 kawasan	750.000.000

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Untuk dapat menjalankan proses tersebut, beberapa kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2021 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana kerja ini selain sebagai upaya menjalankan tugas dan fungsi, juga dalam upaya melaksanakan pencapaian target program dan kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Rencana kerja dan pendanaan DKP Kota Pekalongan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan DKP Kota Pekalongan  
Tahun Anggaran 2022

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir DPA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022														
Nomor DPA : DPA/A.1/3.25.0.00.0.00.01.00/001/2021														
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan														
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>									
3	25				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									
3	25	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
3	25	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			10.750.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	10.750.000	
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.500.000	
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			18.250.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	18.250.000	
3	25	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									
									4.183.152.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.183.152.000	

3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.124.652.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.124.652.000
3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			57.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	57.000.000
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.500.000
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>9.500.000</b>	<b>Rp 0</b>	<b>Rp 0</b>	<b>Rp 0</b>	<b>9.500.000</b>
3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	9.500.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>228.679.000</b>	<b>35.430.000</b>	<b>Rp 0</b>	<b>Rp 0</b>	<b>264.109.000</b>	
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.500.000	
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23.670.000	35.330.000	Rp 0	Rp 0	59.000.000	
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4.250.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	4.250.000	
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			53.359.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	53.359.000	
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			7.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	7.500.000	
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.400.000	100.000	Rp 0	Rp 0	2.500.000	
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			130.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	130.000.000	
3	25	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>306.000.000</b>	<b>Rp 0</b>	<b>Rp 0</b>	<b>Rp 0</b>	<b>306.000.000</b>	
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.800.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	1.800.000	
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			195.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	195.000.000	
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			109.200.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	109.200.000	
3	25	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>189.374.000</b>	<b>399.700.000</b>	<b>Rp 0</b>	<b>Rp 0</b>	<b>589.074.000</b>	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			97.574.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	97.574.000	
3	25	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			16.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	16.000.000	
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			53.300.000	399.700.000	Rp 0	Rp 0	453.000.000	
3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			22.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	22.500.000	
3	25	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>				<b>2.878.859.000</b>	<b>698.591.000</b>	<b>Rp 0</b>	<b>Rp 0</b>	<b>3.577.450.000</b>	
3	25	03	2.01		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>				<b>27.000.000</b>	<b>Rp 0</b>	<b>Rp 0</b>	<b>Rp 0</b>	<b>27.000.000</b>	
3	25	03	2.01		<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>				<b>67.967.000</b>	<b>652.233.000</b>	<b>Rp 0</b>	<b>Rp 0</b>	<b>720.200.000</b>	
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			27.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	27.000.000	
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		67.967.000	652.233.000	Rp 0	Rp 0	720.200.000	
3	25	03	2.02		<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>32.250.000</b>	<b>Rp 0</b>	<b>Rp 0</b>	<b>Rp 0</b>	<b>32.250.000</b>	
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			32.250.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	32.250.000	
3	25	03	2.03		<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>				<b>2.751.642.000</b>	<b>46.358.000</b>	<b>Rp 0</b>	<b>Rp 0</b>	<b>2.798.000.000</b>	
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2.751.642.000	46.358.000	Rp 0	Rp 0	2.798.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	25	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>				505.000.000	2.000.000	Rp 0	Rp 0	507.000.000	
3	25	04	2.02		<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>				322.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	322.000.000	
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			281.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	281.000.000	
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			41.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	41.000.000	
3	25	04	2.04		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>				183.000.000	2.000.000	Rp 0	Rp 0	185.000.000	
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			23.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	23.000.000	
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			160.000.000	2.000.000	Rp 0	Rp 0	162.000.000	
3	25	06			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>				396.975.000	309.825.000	Rp 0	Rp 0	706.800.000	
3	25	06	2.03		<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>				396.975.000	309.825.000	Rp 0	Rp 0	706.800.000	
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			396.975.000	309.825.000	Rp 0	Rp 0	706.800.000	

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa rencana kerja pada tahun 2022 DKP Kota Pekalongan melaksanakan 1 (satu) Pilihan Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Kelautan dan Perikanan, urusan tersebut dituangkan ke dalam 4 (Empat) Program , 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 30 (Tiga puluh) sub kegiatan.

## **BAB. VII PENUTUP**

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2022, sangat tergantung kepada kondisi sosial budaya, ekonomi dan politik, serta ditunjang oleh partisipasi berbagai komponen masyarakat dan sikap mental penyelenggara di daerah, khususnya jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.

Renja merupakan penjabaran dari RPJMD, RENSTRA, kondisi lingkungan hidup, pengalaman empirik, dan dilandasi oleh landasan hukum yang jelas, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua *stakeholder*. Renstra diharapkan menjadi dokumen perencanaan taktis-strategis yang dijadikan dasar perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan tahunan dan penyusunan APBD di bidang kelautan dan perikanan.

Monitoring dan evaluasi kinerja yang hasilnya menjadi bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja perlu dilakukan secara lebih cermat dan akurat. Dari hasil evaluasi tersebut akan dapat direncanakan langkah-langkah yang tepat, untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan mengembangkan hasil-hasil kegiatan yang sudah dapat di implementasikan secara berkesinambungan.

Semoga RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kota Pekalongan



Ir. AGUS JATI WALUYO  
Pembina Utama muda

NIP. 19620105 19860103 1 012